

BAB IV

**ANALISIS PEMBERITAAN TENTANG FATWA HARAM
PLTN DI HARIAN SUARA MERDEKA DAN JAWA POS
RADAR KUDUS (EDISI SEPTEMBER 2007)**

**4.1. Analisis Framing Berita Fatwa Haram Pada Harian Suara Merdeka
Edisi September 2007**

4.1.1. Frame Suara Merdeka, 3 September 2007

NU Haramkan PLTN Muria

“Ulama Ingin Hindari Kerusakan”

Dalam frame Suara Merdeka, fatwa haram, keputusan ini hanya berlaku untuk rencana proyek PLTN Muria dalam konteks lokal Jepara dan sekitarnya. Keputusan para ulama ini juga mengasumsikan masih ada sumber energi listrik lain yang masih bisa dieksplorasi. Perkataan ini, diambil dari jumpa pers Sekretaris Tim Perumus Hasil Mubahastah, KH Ahmad Roziqin, bersama Ketua Tim KH Kholilurrohman dan Ketua Tanfidz PCNU Jepara, KH Nuruddin Amin. Dalam berita ini, Fatwa haram dikeluarkan, karena ada keresahan dari masyarakat rencana pembangunan PLTN.

Dari Analisis Struktur Sintaksis, dapat dilihat bagaimana wartawan dalam menyusun berita. Berita dengan judul: “Ulama

Ingin Hindari Kerusakan”. NU haramkan PLTN Muria. Berita ini mempertegas bahwa Suara Merdeka setuju fatwa haram PLTN. Mempertajam pemberitaan di *led* untuk menepis keraguan-raguan tersebut:

Para ulama NU di Jateng yang mengikuti *mubahatsah* (pembahasan) di gedung PCNU Jepara, Sabtu (1/9) dan Minggu (2/9) mengharamkan pembangunan PLTN Muria. Keputusan hukum fikih Islam itu diungkapkan dalam konferensi pers, Minggu (2/9). Kendati sudah ada keputusan, secara organisasi NU belum menentukan sikap.

Lead ini, didukung pula kutipan pernyataan Zakaria Anshori, ketua Garda Muria Jepara, secara tegas mendukung fatwa haram yang dikeluarkan PC NU Jepara,

"Kalau sudah ada keputusan lewat LBM, kenapa NU tidak bersikap. Ini sangat saya sesalkan, apalagi ribuan warga Balong sudah berjalan jauh menantikan sikap NU.

Untuk mendukung keputusannya, berita ini menggunakan latar yakni informasi, latar ini, menginformasikan dasar pengharaman, adapun isi pengharaman sebagai berikut:

Dasar pengharaman itu yakni dari sisi keuntungannya diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan listrik nasional 2-4%. Sedangkan perkiraan keburukannya adalah kepastian adanya limbah radioaktif yang diragukan kemampuan penanganannya. Dalam mempertimbangkan ini, acuan para ulama itu adalah mengindari kerusakan lebih didahulukan ketimbang menegakkan kebaikan.

Dari penyampaian berita seperti ini, Suara Merdeka mencoba menekan pembaca. Alur tulisan semacam ini, disampaikan dari awal hingga akhir teks, mengambil kutipan-kutipan dari beberapa nara sumber.

Sedangkan dari Struktur Skrip yakni bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (who) Para ulama NU, (when) Sabtu-Minggu 1-2 September 2007, (where) gedung PCNU Jepara, (what) menegaskan bahwa PCNU Jepara mengharamkan pembangunan PLTN Muria (why) karena masih ada sumber energi listrik lain yang masih bisa digunakan.

Di pandang dari sudut Tematik yakni cara wartawan menulis fakta, penulisan berita dari awal sampai akhir, wartawan memberi tekanan terhadap pimpinan pusat NU untuk merestui fatwa haram PLTN yang dikeluarkan LBM PC NU Jepara.,

Dari Struktur Retoris yaitu cara wartawan menekankan fakta. Dalam teks berita yang menekankan pada kata NU haramkan PLTN Muria, melalui kata ini, wartawan mempertajam dan lebih bobot nilai berita.

4.1.2. Frame Suara Merdeka, 04 September 2007

“Hasyim: Warga Belum Percaya Pemerintah”

Batan Tidak Sependapat Fatwa Haram PLTN

Hasyim Muzadi berpendapat, Nuklir tidak bisa hukuminya haram atau halal, tergantung penggunaannya. Penolakan ulama Jepara berakar dari gardu listrik yang meledak. Padahal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), masih diperlukan di Indonesia sepanjang untuk tujuan kemaslahatan umat.

Dari analisis Sintaksis, Suara Merdeka dalam membingkai bagan berita. Hal ini tertuang dalam judul berita : “Hasyim: Warga Belum Percaya Pemerintah”. Pandangan hasyim tentang warga belum percaya pemerintah, warga hanya melihat dari segi dampaknya saja, tidak melihat manfaatnya. Lanjut dia Sumber energi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan energi lainnya, jika masyarakat Jepara menolak lokasi di pindah ke daerah lain karena Indonesia membutuhkan banyak tenaga listrik.

Suara merdeka mempertajam beritanya dengan mempertegas *led* yakni:

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menjelaskan, penolakan para ulama di Jepara sebenarnya berakar dari adanya kekhawatiran. Mereka belum percaya pemerintah bisa memastikan keselamatan proyek tersebut. "Gardu listrik saja meledak, lalu bagaimana nantinya kalau ada kebocoran nuklir, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Jepara," katanya di PBNU, Senin (3/9).

Dari *led* ini juga mendapatkan sokongan dari pernyataan Ferhat Aziz Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)

"Mungkin mereka meragukan kemampuan anak bangsa. Kita sangat mampu, SDM kita sebenarnya sangat bagus. Kita jangan menggenalisir ketidakmampuan kepada semua orang. Selain itu, kita mempunyai waktu yang sangat cukup,"

Suara Merdeka mencoba menyampaikan informasi bahwa penolakan pembangunan PLTN berlebihan karena Cuma memandang dari satu segi. Padahal pemerintah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi.

Struktur Skrip, mengisahkan kurang setuju Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi tentang penolakan ulama Jepara pembangunan PLTN, di lihat dari kelengkapan unsur KH Hasyim Muzadi (who), penolakan para ulama di Jepara (what), Senin 03 September 2007. belum percaya pemerintah bisa memastikan keselamatan proyek (when), (why), energi nuklir tetap diperlukan di Indonesia sepanjang untuk tujuan damai dan sebagai energi alternatif.

Dengan penyusunan Skrip seperti ini, maka yang akan ditangkap khalayak umum bahwa Hasyim kurang setuju dengan keputusan fatwa haram yang di keluarkan PC NU Jepara.

Dari segi Struktur Tematik, berita ini, menyampaikan kepada khalayak, pertama; ketidaksetujuan Hasyim pada ulama

Jepara tentang fatwa haram PLTN. Hasyim menekankan aspek hukum halal dan haram PLTN tergantung penggunaannya.

Tema kedua, Batan tidak sependapat dengan fatwa haram tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), yang dikeluarkan ulama NU di Jepara dua hari lalu, Batan mampu dalam penanganan limbah nuklir. Dari kedua tema diatas, wartawan dalam menulis menggunakan koherensi kontras.

Struktur Retoris, dalam penulisan berita ini, wartawan menekankan fakta, pada teks, Hasyim tidak sependapat dengan ulama Jepara dan Batan tidak sependapat fatwa haram PLTN. Penekanan dapat disimak pada pemilihan kalimat yakni gayanya demo bukan gaya NU, kalimat ini, mencitrakan kepada masyarakat luas ada sikap tidak senang pada Ulama Jepara.

4.1.3. Frame Suara Merdeka, 05 September 2007

“MUI Akan Minta Pendapat Ahli”

Soal Fatwa Pembangunan PLTN

Sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa PLTN akan meminta pendapat semua pihak, termasuk para ahli dibidang nuklir. Namun hingga sekarang belum ada pihak yang meminta MUI mengeluarkan fatwa haram PLTN

Struktur Sintesis, Suara Merdeka dalam menampilkan berita mengenai sikap MUI mengenai PLTN, meminta pendapat dari MUI dan BATAN. KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Umum MUI Prof Dr Din, berikut pendapat pengurus MUI.

"Kalau diminta mengeluarkan fatwa, kami akan mengikuti perkembangan masalah lebih dahulu. Kemudian memonitor, dan baru mengeluarkan keputusan. Fatwa kan harus ada permintaan, bisa dari pemerintah, masyarakat, atau pihak lainnya," ujar KH Ma'ruf Amin ketua MUI

Ketika dimintai pendapat soal fatwa haram PLTN, pihak BATAN yang di wakili arif menjelaskan

“Penjelasan yang akurat mengenai permasalahan tersebut harus lebih mengemuka, sehingga semua pihak dapat lebih saling mengerti.”

Dalam bagian teks berita ini, Suara Merdeka menghadirkan secara apik yaitu meminta beberapa pendapat pijak yang terkait hingga memunculkan berita yang seimbang tidak memihak salah satu kepentingan.

Sementara itu dari Tematik, berita ini akan membawa tema besar yang akan ditampilkan dalam publik, pertama MUI akan meminta pihak ahli, kelihatan MUI bersikap hati-hati dalam mengeluarkan fatwa, masih monitor perkembangan pembangun PLTN dan membutuhkan masukan dari ahlinya.

Tema kedua, Soal Fatwa Haram PLTN, MUI berpendapat fatwa haram harus dilandasi alasan yang jelas dan objektif. Agar objektif membutuhkan pertimbangan matang, setelah melakukan pengamatan lebih dalam. MUI akan mengeluarkan sikap resmi. Dari kedua tema di atas, suara merdeka secara detail menghadirkan pendapat tokoh yang mempunyai hajat dan lembaga keagamaan.

Struktur Retoris, wartawan menulis berita ini, menekan berita menampilkan gambar ketua MUI melalui gambar itu, suara merdeka mencoba mengeluarkan opini bahwa MUI masih ragu-ragu memutuskan permasalahan tersebut.

4.1.4. Frame Suara Merdeka, 05 September 2007

“PBNU Diminta Pahami Dinamika Nahdliyyin”

Terkait PLTN Muria

Pernyataan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi bahwa gaya aspirasi masyarakat calon tapak PLTN Muria bukan gaya NU namun gaya LSM, perkataan Hasyim mendapat reaksi keras dari Ketua PCNU Jepara KH Nuruddin Amin.

"Saya sangat menyesalkan respons Pak Hasyim yang menyebut gaya demo warga dalam menyalurkan aspirasi sebagai gaya LSM, dan bukan gaya NU. Apa beda gaya NU dengan gaya LSM dalam substansi persoalan ini," kata Nuruddin Amin ketua PC NU Jepara

Perangkat Sintesis yang lain, Suara Merdeka memilih latar berita yaitu aktivis dari Network for Indonesian Democracy Japan (Nindja), Watanabe Eri. Aktivis perempuan asal Tokyo itu datang ke Jepara dan menyatakan aksi serupa juga terjadi di semua unit di PLTN Jepang.

Dalam Struktur Skrip, wartawan mengisahkan dengan detail yakni perkataan Hasyim, bahwa aspirasi masyarakat bukan cara NU tapi gaya LSM, Hasyim kurang setuju, jika aspirasi disampaikan dengan cara demonstrasi, tiap masalah dipecahkan secara musyawarah. Dalam teks berita ini terdapat unsur-unsur penting berita yaitu: Who (Ketua PCNU Jepara), What (bukan gaya LSM), How (Hasyim).

Struktur Tematik, dalam berita ini terdapat dua tema yakni pertama perkataan PB NU yang menilai PC NU Jepara dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan cara LSM bukan cara NU yang sesungguhnya. Kedua, sikap warga Jepara mendapat dukungan dari aktifis Jepang yang menolak pendirian PLTN

Struktur Retoris, wartawan menekan isi berita, pada kata gaya LSM. Dengan penekanan tersebut, berita yang disajikan lebih menarik dan berbobot.

4.1.5. Frame Suara Merdeka, 09 September 2007

“MUI Akan Keluarkan Fatwa soal PLTN Muria”

Fatwa haram yang dikeluarkan PC NU Jepara, disakapi secara serius oleh MUI, MUI berencana mengeluarkan fatwa terkait permasalahan tersebut. Untuk memutuskan fatwa harus memenuhi persyaratan yaitu, dasar keputusan fatwa harus kuat. Fatwa tidak boleh dikeluarkan berdasarkan dugaan atau kekhawatiran. Saat ini MUI belum berani mengeluarkan fatwa karena harus mengkaji ulang keuntungan dan kerugian fatwa tersebut

Suara merdeka dalam menggunakan Struktur Sintaksis Judul yaitu “MUI Akan mengeluarkan Fatwa soal PLTN”, berita ini menekan seakan-akan harian ini, menuntut MUI mengeluarkan sikapnya. Namun dalam di tubuh berita dikisahkan MUI mengambil sikap.

Suara Merdeka menekan isi berita melalui pernyataan dari, Ichwan Sam, Sekretaris Umum MUI

"Ya, tapi sebelumnya kita akan melihat permasalahan, MUI akan melakukan, menghimpun masalah yang erat kaitannya dengan kebutuhan umat. Tapi sekarang belum (mengeluarkan fatwa-red), saya kira masih banyak waktu. Beberapa kali masalah itu sudah muncul di rapat pengurus harian,"

Isi berita ini didukung oleh perangkat latar yang mengisahkan mengenai bahaya pembangunan dan pengoperasian PLTN, yang timbul di tengah masyarakat dan mencari tahu secara detil mengenai nuklir dan keamanannya. Ada pun isi sikap MUI yang belum berani memutuskan yaitu,

"Apakah nuklir akan mewujudkan kemaslahatan. Dari segi karakter nuklirnya, dari letak PLTN, dan segi kepentingan pemerintah Indonesia."

Dari sudut tematik, wartawan dalam menulis berita hanya minta pendapat satu sumber saja, hal ini, menandakan Suara Merdeka menekan MUI secepatnya mengambil sikap mengenai PLTN.

Struktur Retoris, Suara Merdeka mempertajam berita dengan syarat-syarat memutuskan kasus PLTN, dan MUI tidak mau di salahkan oleh semua kalangan.

Dari frame kelima berita di atas, Suara Merdeka menyajikan berita secara seimbang karena data yang ditampilkan memuat pendapat sumber yang pro dan kontra. Suara Merdeka benar-benar mengutamakan perkembangan, kemajuan daerah di

Jawa Tengah dan mencoba mempererat atau mempersatukan semua etnis yang berbeda tanpa memandang ideologi.

Berita yang disuguhkan Suara Merdeka, mencoba menghormati pluralitas, secara tidak langsung ikut andil dalam syiar agama Islam, tiap berita di harian ini, berdasarkan sumber yang berkompeten, jadi selain memuat berita-berita peristiwa, Suara Merdeka juga memosisikan sebagai dai.

4.2. Analisis Framing Berita Fatwa Haram pada Harian Jawa Pos Radar Kudus Edisi September 2007

4.2.1. Frame Radar Kudus, 3 September 2007

“ Sikap PCNU Jepara Masih Abu-Abu”

Meski LBM Putuskan PLTN Muria Haram

Struktur Sintaksis, pada pemberitaan Radar Kudus, dengan judul “Sikap NU Jepara masih Abu-Abu” meski LBM putuskan Haram, dari judul ini wartawan mencoba menekan pembaca bahwa PC NU kurang serius menolak berdirian PLTN di Semanjung Muria, dari sini terlihat Radar Kudus mencoba menyetujui fatwa haram, untuk mendukung berita ini, untuk mempertegas berita terdapat di *lead*

Kekhawatiran sebagian pihak bahwa NU tidak berani mengambil sikap tegas menolak pembangunan PLTN di Semanjung Muria terbukti. Meski Ketua PCNU Jepara Nuruddin Amin dalam beberapa kesempatan sebelumnya pernah mengatakan

bahwa sikap NU secara organisatoris akan ditentukan dalam rapat bahsul massail 1 September 2007, tapi sampai kemarin ternyata sikap NU masih belum jelas alias abu-abu.

Untuk memperkuat *Lead* ini, berita disertai pernyataan dari KH Ahmad Roziqin selaku Sekretaris Tim Perumus Bahtsul Masail mubahatsah alim ulama.

“Keputusan ini bersifat lokal artinya untuk konteks pembangunan PLTN di Semenanjung Muria. Artinya tidak seluruhnya PLTN secara keseluruhan hukumnya haram,” jelas Rozikin

Berita ini menggunakan latar data informasi mengenai sikap PC NU yang masih abu-abu dalam mengambil sikap tentang PLTN, adapun isi abu-abu sebagai berikut.

Pasalnya untuk menjadi keputusan resmi secara organisasi ada forumnya tersendiri. Ini belum sikap resmi PCNU Jepara. PCNU akan memfollow-upi.

Dari isi berita yang ditulis wartawan dari awal hingga akhir, sertai berbagai pendapat narasumber. Radar kodus menekan supaya PLTN di hukumi haram.

Sedangkan Struktur Skrip, wartawan menggambarkan berdasarkan fakta di lapangan yaitu: (who) Para ulama NU, (when) Minggu 2 September 2007, (where) gedung PCNU Jepara, (what) PC NU masih abu-abu (why) keputusan resmi secara organisasi ada forumnya tersendiri.

Struktur Tematik, wartawan dalam menyusun penulisan disuguhkan secara bagus karena disertai kutipan pendapat sumber-sumber yang terlibat. Radar Kudus menekan PC NU Jepara,

menjadikan hasil Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Tengah yang bekerjasama dengan PCNU Jepara, sebagai dasar pengharaman PLTN Muria.

Struktur Retoris, agar teks berita ini, mempunyai nilai bobot, wartawan mempertajam, pada kata sikap PC NU Jepara tidak tegas menolak PLTN, meski LBM memutuskan haram.

4.2.2. Frame Radar Kudus, 3 September 2007

“Gus Dur Bentuk Garda Muria”

Bentuk Penolakan PLTN

Dalam frame Radar Kudus, penolakan pembangunan PLTN di semenanjung muria adalah harga mati, dengan menurun berita DPP PKB Abdurrahman Wahid membentuk Garda Muria.

Dari Struktur Sintaksis, bagaimana wartawan menyusun berita dengan mengambil judul “Gusdur Bentuk Garda Muria”, Bentuk penolakan PLTN dalam berita ini, Radar Kudus menekankan bahwa pembangunan PLTN tidak boleh didirikan di Semenanjung Muria. Berita didukung *lead*.

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur benar-benar serius menolak rencana pembangunan PLTN di semenanjung Muria.

Lead ini, sokong pernyataan sikap tegas dari, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziyah DPP PKB Zannuba Arifah Chafsoh

Pertama, Garda Muria bertugas untuk mengawal gerakan anti PLTN. Tugas kedua, Garda Muria juga mempunyai kewajiban untuk merawat dan melindungi situs-situs bersejarah diantaranya

makam-makam para wali yang sangat dihormati khususnya kaum Nahdhiyin. Terakhir, para pengurus Garda diminta untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari intimidasi serta ancaman pihak-pihak tertentu dalam upaya untuk menggagalkan gerakan penolakan PLTN.

Berita ini memakai latar penolakan, menggunakan latar informasi, isi penolakan yakni,

Sikap penolakannya tersebut didasari sikap pemerintah yang tidak jujur mengenai proyek PLTN.

Dari analisis Struktur Skrip, cara wartawan menyusun berita berdasarkan realita di lapangan antara lain, (who) Gusdur, (when) Sabtu 1 September 2007, (where) gedung DPRD Jepara, (what) pembentukan Garda Muria.

Struktur Tematik, untuk menekan berita wartawan dalam menulis, mengambil beberapa sudut pandang berupa tema, pertama, PLTN Muria Haram, Kedua, Anshor-Banser Tiga Wilayah Tolak PLTN, menandakan Radar Kudus sangat setuju dengan penolakan dari tidak ada pendapat dari tokoh yang kontra. Tema ini, disusun saling berhubungan sebab akibat, dapat juga berupa hubungan penjelas:

Struktur Retoris. Wartawan dalam menyajikan berita mempetegas berita berdasarkan fakta di lapangan. Bagian yang di tonjolkan pada sub judul untuk menekankan kepada khalayak pentingnya bagian tersebut.

4.2.3. Frame Radar Kudus, 3 September 2007

“PLTN Sebagai Solusi Terakhir”

Pembangunan mega proyek PLTN Semanjung Muria sebagai solusi terakhir dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, meskipun Indonesia memiliki energi alternatif, seperti energi panas bumi, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, biomassa, dan biodiesel.

Dari analisis sintaksis, dapat dilihat dari bagaimana wartawan menulis berita. Berita dengan judul “PLTN Sebagai Solusi Terakhir”, dalam berita ini Radar Kudus menyetujui PLTN sebagai solusi terakhir dalam memenuhi kebutuhan listrik. Untuk mendukung berita di perkuat pernyataan dari Iwan Kurniawan

“Pembangunan PLTN ini merupakan alternatif yang terakhir untuk menyokong energi listrik di Indonesia,” terang Iwan Kurniawan

Berita ini dipertajam dari pernyataan Agus Nurdianto. ketua Meric (Muria Environment Research International)

“Negara kita belum saatnya membangun PLTN. Kita saat ini belum mempunyai SDM yang cukup untuk membangun PLTN,”

Radar Kudus mencoba membius khalayak, untuk ikut menolak pembangunan PLTN. PLTN merupakan solusi terakhir dan Indonesia belum siap kehadiran PLTN karena tidak memiliki SDM yang mampu menanganinya.

Sedangkan dari struktur skrip yakni bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (who) Jamaah gereja, (when) Sabtu-

Minggu 1 2007, (where) RM Sapto Rengo, (what) energi PLTN solusi terakhir (why) mengutamakan energi alternatif.

4.2.4. Frame Radar Kudus, 05 September 2007

“Hasyim Muzadi Harus Paham Warga”

Dari Struktur Sintaksis, dapat diamati dari bagaimana wartawan dalam menulis. Radar kudus mengambil berita yang berjudul “Hasyim Muzadi Harus Paham Warga”. Berita ini menekan khalayak di lead.

Ketua PB NU Hasyim Muzadi diharapkan untuk lebih mengerti bagaimana karakter dari warganya sendiri. Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI Mufid Busyairi dalam press releasenya kemarin.

Pandangan Radar Kudus tentang pernyataan Ketua PB NU Hasyim Muzadi gaya demo warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara, yang dikatakan Hasyim bukanlah gaya NU, melainkan gaya LSM. Dalam skema atau bagan berita frame Radar kudus kurang seimbang dalam menghadirkan fakta karena hanya meminta satu nara sumber hingga akhir berita.

Dari struktur retorik yaitu cara wartawan menekankan fakta. Dalam teks ini, lebih menekankan gaya LSM, dari penekanan tersebut nilai bobot berita lebih menarik pembaca.

Dari keempat frame Radar Kudus, dalam menceritakan peristiwa, kurang seimbang karena tidak terdapat sumber yang kontra, justru sebaliknya hanya menampilkan sumber yang

mendukung penolakan, Namun, di masyarakat tidak menimbulkan polemik karena judul yang dipilih memposisikan tidak memihak kedua kelompok yang pro dan kontra.

Radar Kudus dengan tidak memperkeruh keadaan, secara tak sadar telah melakukan dakwah, karena terdapat pesan sosial sehingga khalayak yang pro dan kontra yang membaca tidak terbawa dalam suasana panas pendirian PLTN dan menahan diri dalam bertindak.